

**Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kota Semarang berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Sampah**

Oleh :

Indira Febryanti, Dra.Margaretha Suryaningsih, MS
Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jl. Profesor Haji Sudarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Waste Handling is one of ways that Semarang Local Government do to overcoming problem about the high amount of waste in Semarang City. Waste handling policy is important because waste is an important problem that need to be resolved to create a clean and health environment. This research will further elaborate the implementation of waste handling policy in Semarang City.

The method that is used in this research is qualitative – descriptive type, with informants from the staff of Living Environment Agency of Semarang, Final Processing Place Jatibarang whose specially handling about waste handling policy in Semarang City, Society Group who doing waste management, and society in Semarang City. The purpose of this study is to analyze the implementation of waste handling using 5 accuracy theory from Riant Nugroho and describe factors that influence the policy implementation using theory from Van Meter and Van Horn.

The result of the research shown that in the policy implementation which is undertaken, there are problems related to socialization of the policy which not touching all society yet; society's response that is not support waste handling policy; and process of society's acceptance toward the policy which is showing refusal for the policy. Constraint factors of the waste handling policy are resources and social condition from Semarang's societies. Recommendation which is given from this research are; the government have to be more active in socializing waste handling policy, improvement of the human resources and facilities which supporting the policy; and addition and activating of TPS 3R in Semarang City that along with companion toward TPS 3R's caretaker.

Keywords : Policy, Implementation, Waste Handling

Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah yang dipadati oleh penduduk karena di Kota ini terdapat banyak instansi pemerintah, swasta, industri pabrik, dan tempat studi ternama yang membuat penduduk Indonesia dari berbagai daerah memutuskan untuk melakukan perpindahan dari daerah asal mereka ke Kota Semarang ini. Semarang dengan jumlah penduduk mencapai 1,6 juta jiwa yang tersebar di 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan setiap harinya menghasilkan 1000 ton sampah, sementara yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) mencapai 850 ton, 15% sisanya dikelola oleh kurang lebih 50 bank sampah yang ada di Kota Semarang.

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang merupakan satu-satunya TPA yang terdapat di Kota Semarang. TPA Jatibarang yang terletak di Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen ini memiliki luas

wilayah sebesar 460.183m² dengan pembagian lahan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Penggunaan Lahan pada TPA
Jatibarang

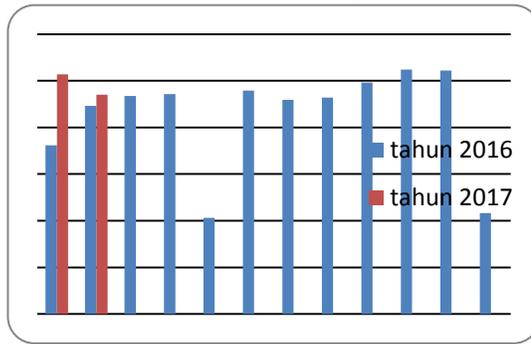
No	Penggunaan Lahan	Luas Lahan yang terpakai (m ²)
1	Lahan cover	46.018
2	Sabuk Hijau	46.018
3	Kolam Lindi	46.018
4	Infrastruktur	46.018
5	Luas Area Buang	276.470
Jumlah		460.183

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2017

Dengan luas lahan yang terbatas, TPA Jatibarang diharuskan menampung sampah yang volumenya selalu meningkat setiap tahunnya. Berikut merupakan data mengenai volume sampah yang masuk ke TPA Jatibarang :

Gambar 1.1

**Volume Sampah yang Masuk ke
TPA Jatibarang**



*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup
Kota Semarang, 2017*

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa volume sampah yang masuk ke TPA Jatibarang cukup fluktuatif, kadang meningkat dan terkadang menurun. Tetapi dalam hitungan per tahun, di bulan Januari dan Februari 2017 volume sampah yang masuk ke TPA Jatibarang terlihat meningkat dibandingkan dengan bulan Januari dan Februari 2016.

Permasalahan sampah yang ada di Kota Semarang ini sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Kota Semarang. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Kota Semarang membuat sebuah Peraturan berupa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

B. Tujuan

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012.

C. Teori

Teori yang digunakan adalah :

1. Administrasi Publik

Menurut **Edward H Litchfield** dalam Syafiie (2006 : 24), administrasi publik adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintahan diorganisir, dilengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan dan dipimpin.

2. Implementasi Kebijakan

Dalam Pasolong (2008 : 57 – 58), **Bernadine R. Wijaya dan Susilo Supardjo**, mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktek.

D. Fenomena Penelitian

1. Implementasi Kebijakan

Fenomena yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

A. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan dinilai dari seberapa jauh kebijakan penanganan sampah dapat memecahkan permasalahan sampah dan kejelasan isi kebijakan penanganan sampah dari pemerintah terhadap masyarakat. Hal ini dapat dinilai dari intensitas tujuan dan kejelasan isi.

B. Ketepatan Pelaksanaan

Ketepatan pelaksana dinilai dari peran ketiga pilar good governance, yaitu : peran pemerintah dalam implementasi kebijakan penanganan sampah; peran swasta dalam implementasi kebijakan penanganan sampah; peran masyarakat dalam implementasi kebijakan penanganan sampah; dan actor yang berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan penanganan sampah.

C. Ketepatan Target

Ketepatan target dapat dinilai dari : respon masyarakat terhadap kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang dan intervensi kebijakan penanganan sampah dengan kebijakan lain.

D. Ketepatan Lingkungan

Ketepatan lingkungan dinilai dari lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal dapat dilihat dari interaksi lembaga pembuat dengan lembaga pelaksana kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang. Sedangkan lingkungan eksternal dapat dilihat dari interaksi lembaga pelaksana dengan media massa dalam implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang, dan interaksi lembaga pelaksana dengan masyarakat dalam implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang.

E. Ketepatan Proses

Ketepatan proses dapat dinilai dari penerimaan masyarakat terhadap kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang dan kesiapan masyarakat sebagai bagian dari pelaksana kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang.

2. Faktor Penentu Kebijakan

A. Standar dan Sasaran Kebijakan

1. Standar yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan penanganan sampah.

2. Pemahaman tujuan dari kebijakan penanganan sampah.

B. Sumberdaya

1. Sumber daya manusia (pegawai) dan kualitasnya dalam implementasi kebijakan penanganan sampah.
2. Sumber dana untuk pelaksanaan kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang.
3. Fasilitas penunjang yang dimiliki untuk pelaksanaan kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang.

C. Hubungan antar Organisasi

1. Kerjasama pemerintah dengan instansi lain yang melaksanakan kebijakan penanganan sampah.
2. Kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta dalam kebijakan penanganan sampah, khususnya dalam tahap pemrosesan akhir.

D. Karakteristik Agen Pelaksana

1. Struktur birokrasi pemerintah selaku

implementor kebijakan penanganan sampah.

2. Kesesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan pelaksanaan kebijakan penanganan sampah.

E. Kondisi Sosial dan Ekonomi

1. Sumber-sumber ekonomi dalam organisasi pelaksana dalam menunjang implementasi kebijakan penanganan sampah.
2. Respon masyarakat yang merupakan sasaran dari kebijakan penanganan sampah terhadap kebijakan penanganan sampah.

F. Disposisi Implementor

1. Pemahaman dari implementor terhadap Perda yang mengatur tentang kebijakan penanganan sampah.
2. Respon dari implementor terhadap kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang.

E. Metode Penelitian

I. Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian

deskriptif ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan aspek penilaian pada saat penelitian dilakukan.

II. Situs Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, sehingga lokus atau tempat yang diambil adalah berdasarkan focus penelitian di atas yang digunakan peneliti adalah Kota Semarang.

III. Subyek Penelitian

Key informan dalam penelitian ini adalah Kepala UPTD TPA Jatibarang Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

IV. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder dan data primer.

V. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

VI. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *interactive model*.

PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan adalah factor penentu implementasi kebijakan tersebut disebabkan oleh enam variable pendorong dan penghambat. Variable yang menjadi factor pendorong adalah hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana dan disposisi implementor. Sedangkan variable yang menjadi factor penghambat adalah standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya dan kondisi social dan ekonomi.

B. Analisis

1. Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

A. Ketepatan Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan dari kebijakan ini

belum tercapai. Hal ini dibuktikan dari masih banyaknya permasalahan mengenai persampahan di Kota Semarang yang mengakibatkan belum tercapainya tujuan dari kebijakan penanganan sampah ini. Di samping itu, kejelasan isi Perda juga belum tersampaikan ke seluruh lapisan masyarakat Kota Semarang.

B. Ketepatan Pelaksanaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang selaku pihak implementor telah melakukan penyediaan fasilitas penunjang, menyediakan sumber daya, melakukan kerjasama dengan pihak swasta dan membentuk UPTD TPA Jatibarang.

Sedangkan peran swasta yaitu PT Narpati adalah membantu tahap pemrosesan akhir sampah dengan cara mengolah sampah TPA menjadi granule kompos yang memiliki nilai jual.

Peran masyarakat sebagai target dari kebijakan penanganan sampah adalah membantu menaati peraturan tentang kebijakan penanganan sampah serta berpartisipasi aktif dalam melakukan pengolahan sampah.

C. Ketepatan Target

Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon masyarakat terhadap kebijakan penanganan sampah cukup beragam. Sebagian masyarakat Kota Semarang sudah mengetahui dan turut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kebijakan ini. Sementara masih ada sebagian masyarakat yang kurang peduli dan melakukan tindakan membuang sampah tidak pada tempatnya.

Mengenai intervensi kebijakan lain terhadap kebijakan penanganan sampah ini ialah tidak ditemukan adanya intervensi dari kebijakan lain.

D. Ketepatan Lingkungan

Berdasarkan hasil penelitian, lingkungan internal kebijakan dinilai sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dari interaksi Dinas Lingkungan Hidup dengan UPT Kebersihan dan UPTD TPA Jatibarang yang selalu terjalin dengan baik setiap hari dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian, lingkungan eksternal kebijakan sudah dinilai baik. Hal ini dibuktikan dari interaksi Dinas Lingkungan Hidup dengan media massa dalam hal sosialisasi kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang.

E. Ketepatan Proses

Berdasarkan hasil penelitian, penerimaan masyarakat terhadap kebijakan penanganan sampah ini cukup beragam. Sebagian masyarakat dapat menerima kebijakan ini, yang dibuktikan dari peran aktif masyarakat dalam kebijakan ini. Di sisi lain, ada masyarakat yang belum dapat menerima kebijakan ini yang dibuktikan dari ketidaktahuan mereka akan kebijakan ini dan minimnya peran serta masyarakat akan kebijakan ini.

Berdasarkan hasil penelitian, kesiapan pelaksana yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang telah siap dalam menerima kebijakan ini. Hal ini dibuktikan dari pembentukan UPT Kebersihan dan UPTD TPA Jatibarang sebagai sarana penunjang pelaksanaan kebijakan penanganan sampah.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

A. Standar dan Sasaran Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, standar kebijakan dinilai sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara yang menunjukkan bahwa dalam tahap pemrosesan akhir telah dibuat SOP (Standart Operating Procedur) sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan penanganan sampah, khususnya pada tahap pengangkutan dan tahap pemrosesan akhir sampah.

Sasaran kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang ini adalah masyarakat Kota Semarang. Hal ini telah dijelaskan di dalam tujuan kebijakan dala Perda Nomor 6 Tahun 2012 yaitu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumberdaya.

B. Sumberdaya

Sumberdaya manusia dalam pelaksanaan kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Pegawai Dinas dinilai sudah memiliki kompetensi yang cukup dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan. Tetapi, jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup dirasa masih kurang dalam pelaksanaan kebijakan penanganan sampah.

Sumberdaya anggaran bersumber dari APBD. Tetapi, jumlah yang sudah dianggarkan belum mencukupi seluruh kebutuhan sebagai sarana penunjang pelaksanaan kebijakan. Sedangkan untuk sumberdaya fasilitas, juga dirasa belum memadai karena adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki untuk pelaksanaan kebijakan.

C. Hubungan Antar Organisasi

Dalam pelaksanaan kebijakan penanganan sampah, Dinas Lingkungan Hidup membentuk UPTD TPA Jatibarang untuk membantu pada tahap pemrosesan akhir. Berdasarkan hasil penelitian, hubungan Dinas Lingkungan Hidup dengan UPTD TPA Jatibarang dinilai baik karena adanya koordinasi yang terjalin setiap harinya mengingat setiap tahap kebijakan penanganan sampah berkesinambungan satu dengan yang lain.

D. Karakteristik Agen Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dianalisis bahwa struktur birokrasi yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup sudah cukup baik, karena dari struktur yang ada sudah terlihat pembagian tugas

yang jelas dalam pelaksanaan kebijakan.

Di samping itu, pola hubungan yang terjalin dalam kebijakan penanganan sampah juga dinilai sudah baik. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Seksi Operasional Bidang Pengelolaan Sampah dengan UPTD TPA Jatibarang sudah baik karena ada kerjasama yang selalu terjalin setiap harinya dalam proses penanganan sampah.

E. Kondisi Sosial dan Ekonomi

Lingkungan social yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan penanganan sampah adalah kebiasaan masyarakat. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih banyak yang belum menyadari tugas mereka untuk menjaga lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Di sisi lain, Pemerintah juga masih kurang melakukan sosialisasi kebijakan penanganan sampah ini.

Kondisi ekonomi yang mempengaruhi kebijakan penanganan sampah adalah kebiasaan sebagian masyarakat yang tidak membayar iuran ke RT untuk pengangkutan sampah dari rumah warga menuju TPS

setempat. Di sisi lain, factor ekonomi juga dapat menunjang tingkat ekonomi masyarakat yang dibuktikan dari sampah yang dikelola secara terpadu yang memiliki nilai jual.

F. Disposisi Implementor

Respon dari Dinas Lingkungan Hidup terhadap pelaksanaan kebijakan penanganan sampah dinilai sudah baik. Hal ini dibuktikan dari adanya upaya oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mengoptimalkan kebijakan ini dengan beberapa cara, yaitu memberikan inovasi baru dari pengolahan sampah yang dilakukan pada TPA Jatibarang antara lain dengan pemanfaatan gas methan untuk dijadikan sumberdaya untuk memasak.

Pemahaman dari Dinas Lingkungan Hidup terhadap pelaksanaan kebijakan penanganan sampah juga dinilai sudah cukup jelas. Hal ini dibuktikan dari pembuatan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang tertuang dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2012 untuk menjelaskan kebijakan ini secara lebih rinci pada seluruh masyarakat Kota Semarang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang dianggap belum optimal dalam pelaksanaannya, walaupun dalam beberapa aspek telah berjalan dengan baik dan sesuai. Adapun aspek-aspek yang dianggap masih belum sesuai dan berakibat pada kurang optimalnya implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang, yakni mengenai ketepatan kebijakan; ketepatan target; dan ketepatan proses. Sedangkan aspek ketepatan pelaksanaan dan ketepatan lingkungan sudah berjalan baik dan sesuai dalam mendukung pelaksanaan kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang.

Faktor yang menjadi pendorong dalam implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang yaitu karakteristik agen pelaksana, hubungan antar organisasi dan disposisi implementor. Sedangkan hal yang dianggap menjadi factor penghambat dalam implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang yaitu sasaran kebijakan, sumber daya dan kondisi social dari masyarakat Kota Semarang.

B. Saran

Saran terhadap permasalahan mengenai implementasi Kebijakan

Penanganan Sampah di Kota Semarang yang penulis berikan adalah :

1. Dinas Lingkungan Hidup harus memberikan sosialisasi secara merata dan mendalam tentang kebijakan Penanganan sampah agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengetahui adanya kebijakan ini dan memahami dengan benar tanggung jawab yang dimiliki oleh masyarakat.
2. Penambahan jumlah TPS dan Bak Sampah pada Kecamatan-kecamatan yang masih memiliki TPS dan Bak Sampah dengan jumlah yang sangat sedikit guna menunjang proses pengumpulan dan pengangkutan sampah dari TPS setempat menuju ke TPA.
3. Pembangunan dan Pengaktifan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu di setiap Kelurahan di Kota Semarang, serta dibutuhkan adanya pendampingan dalam pengelolaan sampah secara 3R (*reuse, reduce, recycle*) oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Keberadaan TPST di Kota Semarang harus diaktifkan kembali dan dibangun dengan sistem per Kelurahan, dimana penampungan sampah dan pengolahan sampah dilakukan di sini sehingga keberadaan TPST dengan jumlah yang banyak ini dapat memberikan dampak yang

positif bagi permasalahan jumlah produksi sampah di Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Kencana, Inu. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Lhalauw, John J. O. I. 2003. *Bangunan Teori*. Salatiga : Fakultas Ekonomi UKSW
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Salim, Agus. 2006. *Bangunan Teori: Metodologi Penelitian Untuk Bidang Sosial, Psikologi, Dan Pendidikan (Edisi Kedua)*. Yogyakarta.: PT Tiara Wacana.
- Subarsono, A.G. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suprayogi, Yogi Sugandi. 2011. *Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Utomo, Warsito. 2007. *Administrasi Publik Baru Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Wahyuningsih N. dkk. 2014.
Persampahan. Semarang: UPT
Undip Press.

Winarno, Budi. 2005. *Kebijakan
Publik (Teori, Proses, dan Studi
Kasus)*.
Yogyakarta: Caps.

Peraturan :

Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah

Peraturan Walikota Semarang Nomor
37 Tahun 2015 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 6 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Sampah

Sumber Internet :

<http://semarangkota.go.id/berita/read/7/berita-kota/1574/semarang-hasilkan-1000-ton-sampah-perhari-sekda-minta-warga-peduli>, diakses 18 Mei 2017 pukul. 19.27

<http://www.liputan6.com/tag/sampah>, diakses 1 Juni 2017 pukul 20.09